

# **ANALISIS PAJAK DAERAH KOTA SURAKARTA**

**PERIODE 2004-2008**



## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat- Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada  
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh

**FAJAR ARDI HADHITAMA**

**B 200 060 026**

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2010**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan, oleh karena itu hasil pembangunan harus dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan tergantung pula pada partisipasi seluruh rakyat, yang berarti juga pembangunan harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat, misalnya berupa kepatuhan pembayaran pajak yang sebagaimana kita ketahui bahwa pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara maupun daerah.

Pelaksanaan program-program pembangunan di segala bidang berlangsung terus menerus dan dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas menyebabkan tidak mungkin jika segala sesuatu diurus seluruhnya oleh pemerintah pusat. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintah negara sampai ke pelosok daerah perlu dibentuk suatu pemerintah daerah.

Sistem pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dikeluarkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2008 ditetapkan bahwa pemerintah

dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, asas pembantuan. Kebijakan desentralisasi ditunjukkan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi kepentingan daerah itu sendiri. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian. Salah satu tolok ukur melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Sumber pendapatan atau penerimaan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Hasil Pajak Daerah
  - b. Hasil Retribusi Daerah
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dari ke tiga sumber penerimaan daerah tersebut di atas pendapatan asli daerah merupakan yang paling peka terhadap aktifitas perekonomian masyarakat, kepekaan tersebut disebabkan unsur-unsur pendapatan asli daerah secara langsung atau tidak langsung yang berasal dari masyarakat yang mana dengan pelaksanaan otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat menggali sumber-sumber yang ada dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah Kota Surakarta mempunyai sumber penerimaan daerah meliputi :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan pemerintah daerah, baik yang ditentukan oleh undang-undang pajak daerah maupun yang merupakan perluasan objek pajak pun juga beragam. Namun bila diteliti masing-masing daerah belum mampu menunjukkan kinerjanya sebagai sumber penerimaan daerah dalam APBD melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sejalan dengan perpajakan nasional, pembinaan dalam pajak daerah harus dilakukan secara terus-menerus terpadu dengan pajak nasional, terutama mengenai objek dan tarif pajak sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi. Atas pertimbangan tersebut dilakukan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 menjadi

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Dalam perubahan undang-undang ini juga memberikan kesempatan kepada daerah kabupaten/kota untuk menggali sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan syarat, undang-undang tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pajak daerah merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah yang dapat memberikan sumbangan yang cukup besar, namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah banyak sekali perubahan di dalam pajak daerah sehingga pajak daerah yang dikelola pemerintah Kota Surakarta terdiri 6 jenis pajak daerah yaitu: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak daerah dengan kaitannya pendapatan asli daerah, pentingnya dilakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PAJAK DAERAH KOTA SURAKARTA PERIODE 2004-2008”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan pajak daerah Kota Surakarta?
2. Seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta?
3. Apakah pemugutan pajak daerah Kota Surakarta selama ini sudah efektif?

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan penelitian dapat berfokus dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka penulis akan membatasi masalah target dan realisasi pendapatan daerah kota Surakarta yaitu pajak daerah mulai tahun 2004 sampai dengan 2008.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan pajak daerah Kota Surakarta.
2. Mengetahui seberapa besar kontribusi dari pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.
3. Mengetahui apakah pemungutan pajak daerah selama ini sudah efektif.

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam mengambil kebijaksanaan dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah.
2. Menambah pembendaharaan pengetahuan praktis bagi mahasiswa dan peneliti lain dalam rangka menerapkan ilmu yang telah diperoleh sebelumnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Pendapatan Daerah, Tinjauan tentang Pajak Daerah dan Tinjauan Penelitian Terdahulu.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang Ruang Lingkup Penelitian, Metode Penelitian, Data dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

### **BAB IV ANALISIS DATA**

Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Kota Surakarta serta Analisis Data dan Pembahasan.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.